



**PERJANJIAN KINERJA
PERWAKILAN BPKP
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

TAHUN 2020

**Nomor : S-1633/PW21/6/2020
Tanggal: 2 September 2020**



**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN**

Jalan Tamalanrea Raya Nomor 3, Bumi Tamalanrea Permai - Makassar
Telepon (0411) 590591 - 590592, Faksimile (0411) 590595
Email : sulsel@bpkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Arman Sahri Harahap
Jabatan : Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Selatan

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

Nama : Muhammad Yusuf Ateh
Jabatan : Kepala BPKP

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Jakarta, 2 September 2020
Pihak Pertama, *h*

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
PERWAKILAN BPKP PROVINSI SULAWESI SELATAN

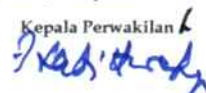
SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	
		Satuan	Jumlah
1	2	3	4
1 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Keuangan Negara/Daerah	1 Nilai optimalisasi penerimaan negara/ daerah yang terealisasi	Rupiah (Juta)	158
	2 Potensi penerimaan negara/ daerah yang dioptimalisasi	Rupiah (Juta)	316
	3 Nilai efisiensi pengeluaran negara dan daerah	Rupiah (Juta)	1.123
	4 Nilai penyelamatan keuangan negara dan daerah	Rupiah (Juta)	27.124
2 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Pembangunan Nasional	1 Jumlah Program Prioritas yang tercapai sesuai target	Program Prioritas	1
	2 Jumlah Kegiatan Prioritas yang diawasi	Kegiatan Prioritas	9
	3 Jumlah Kegiatan Prioritas yang tercapai sesuai target	Kegiatan Prioritas	13
	4 Jumlah PPS yang tercapai sesuai target	Program	4
	5 Persentase hambatan pelaksanaan pembangunan yang diselesaikan	Persen	75
3 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Akuntabilitas Badan Usaha	1 Jumlah BUMD dengan kinerja sehat	BUMD	9
4 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Efektivitas Pengendalian Korupsi	1 Persentase hasil pengawasan represif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	100
	2 Persentase hasil Pengawasan preventif dan edukatif yang dimanfaatkan/ ditindaklanjuti	Persen	70
5 Meningkatkan Pengawasan Pembangunan atas Kualitas Pengendalian Intern K/L/Pemda/BU	1 Jumlah APIP K/L/Pemda dengan Kapabilitas APIP \geq Level 3	K/L/Pemda	12
	2 Jumlah K/L/Pemda dengan Maturitas SPIP \geq Level 3	K/L/Pemda	16
	3 Jumlah Pemda Kab/Kota dengan MRI \geq Level 3	PemKab/Kota	1
	4 Tersedianya Rekomendasi Strategis (Policy Brief) kepada Provinsi/Kabupaten/Kota	Rekomendasi	1
	5 Persentase Jumlah desa yang Menyusun Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Desa	Persen	35
	6 Jumlah APIP yang Mengimplementasikan Siswaskeudes	APIP	1
6 Meningkatkan Tata Kelola Unit Kerja	1 Nilai Skor Zona Integritas Unit Kerja	Skor Skala 100	75
	2 Persentase Pegawai yang mengikuti peningkatan Kompetensi	Persen	100
	3 Persentase administrasi SDM yang diselesaikan tepat waktu	Persen	100
	4 Persentase Penyusunan RKA Tepat Waktu Unit Kerja	Persen	100
	5 Skor IKPA Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Skor Skala 100	86
	6 Persentase SPM yang terbit tepat waktu	Persen	90
	7 Persentase Penyusunan Laporan Keuangan sesuai SAP (khusus Unit Kerja	Persen	100
	8 Nilai Pengelolaan BMN Unit Kerja (khusus Unit Kerja Mandiri)	Predikat Pengelolaan	Baik
	9 Nilai SAKIP Unit Kerja	Skor Skala 100	80
	10 Maturitas SPIP Unit Kerja	Level 1-5	3
	11 Indeks Kualitas Layanan Ketatausahaan Unit Kerja	Indeks Skala 100	70
	12 Indeks Kepuasan Layanan Unit Kerja (khusus Unit Kerja Perwakilan)	Indeks Skala 100	70

Kegiatan	Anggaran
1 Pelaksanaan Pengawasan Intern Akuntabilitas Keuangan Negara dan Pembangunan Nasional Serta Pembinaan Penyelenggaraan SPIP	Rp 4.225.615.000
2 Fasilitas Dukungan Manajemen BPKP	Rp 36.883.549.000
	Rp 41.109.164.000

Kepala BPKP

Muhammad Yusuf Ateh
NIP 19640809 198503 1 001

Jakarta, 2 September 2020

Kepala Perwakilan


Arman Sahri Harahap
NIP 19670110 199303 1 001